KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI			H.1 N	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 0 6 8					H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			н.2	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					Tidak Final		
				H.2  Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan							
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG											
A.1 NPWP : 68 807 584 5 722 000											
A.2 NIK	:										
A.3 Nama : NUR WAHYUNINGSIH											
B. PPh PA	SAL 21 YAN	G DIPOTONG					_				
MASA PA (mm-yy	1.00	E OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)		TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.2	B.3		B.4		B.5	B.6	B.7		
3 2		21-402-01		472.500		472.500	0	5	23.	625	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota											
B.8 Doku	men Referens	i : Nomor Dok	umen [	nen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022							
		Nama Doku	men [	en Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy							
В.9	.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.										
Nomor : Tanggal dd mm								уууу			
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :											
B.11	3.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :										
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK											
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :		шш	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0								
	C.2 Nama Instansi Pemerintah :		RUMAF	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID St	D.3 ID Subunit Organisasi :		Ш								
_			1 6 a	d 0 3 mm	2 0 2 2 <b>уууу</b>						
C.5 Nama	.5 Nama Penandatangan :			HARI JUMADI							
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							
! :				engan ketentuan yang s sehingga tidak diperl		nderal Paja	k mengatur bahwa	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara		

O0X00G82